

PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU ENGGANO PROVINSI BENGKULU

Ahmad Firdiansyah¹⁾, Yar Johan²⁾, Zamdial Ta'alidin²⁾

¹⁾ Prodi Pascasarjana Pengelolaan Sumber Daya Alam Universitas Bengkulu

²⁾ Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Pada wilayah Pulau Enggano terdapat program pengelolaan wilayah pesisir dengan menggunakan pendekatan konservasi terhadap terumbu karang yang dinamakan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) pada tahun 2014. Kawasan Konservasi Perairan (KKP) terletak di Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji persepsi dan partisipasi masyarakat Pulau Enggano analisis yang digunakan penelitian ini menggunakan metode survei, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat pulau Enggano mempunyai tingkat persepsi baik (79,00%) dan tingkat partisipasi aktif (89, 20%) dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP), Strategi yang dapat dilakukan dalam melanjutkan Program pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di pulau Enggano yaitu penegakkan hukum, secara yuridis formal status peraturan desa yang telah ditetapkan oleh desa agar memiliki kekuatan hukum yang tetap. Masih terpolat sebuah pemikiran yang klasik bahwapenegakkan aturan akan efektif jika tindakan atas pelanggaran peraturan yang ditetapkan bersama oleh masyarakat di tingkat desa harus dilakukan oleh intitusi formal seperti polisi/ angkatan laut. Selain itu pengelolaan KKP dipengaruhi juga oleh masalah pendanaan. Dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP), dana dibutuhkan untuk melaksanakan pertemuan, penggantian tanda batas pelampung rambu-rambu Kawasan Konservasi Perairan (KKP), biaya operasional pengawasan. Secara umum kondisi fisik seperti rambu rambu sudah tidak terlihat lagi sehingga tidak menunjukkan fungsi sebagai tanda batas Zona Inti Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Hal yang terpenting diharapkan bahwa masyarakat lokal memiliki kontribusi penuh pengelolaan dari Daerah Peran pemerintah mampu mendorong sikap masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

Kata Kunci : persepsi, partisipasi, pulau enggano

PENDAHULUAN

Indonesia mencanangkan memiliki kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektar pada tahun 2020. Sampai saat ini tercatat sudah sekitar 15 juta Ha kawasan konservasi dan terus dilakukan upaya untuk meningkatkan jumlah luas tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya luas wilayah Kawasan Konservasi Perairan (KKP) secara keseluruhan, pemahaman tentang

pengelolaan kawasan konservasi yang ideal juga semakin berkembang. Hingga saat ini dikenal adanya beberapa kategori yang menandai ideal tidaknya suatu kawasan konservasi baik nasional, atau daerah (Estradivari *dkk*, 2017). Kawasan konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan

lingkungannya secara berkelanjutan (Salim, 2015)

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi konservasi keanekaragaman hayati. Namun Kawasan Konservasi Perairan (KKP) juga dapat memainkan peran penting di dalam pengelolaan perikanan dan pariwisata. Selama ini manfaat perikanan dan pariwisata dipandang sebagai hasil samping dari pelestarian keanekaragaman hayati, namun para ilmuwan dan manajer akhir-akhir ini mengubah cara pandang tersebut dengan memberikan penekanan pada manfaat Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Misalnya, Program Kawasan Habitat Ikan Australia secara khusus menyatakan bahwa Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berfungsi untuk meningkatkan perikanan, sementara pelestarian keanekaragaman hayati dipandang hanya sebagai manfaat tambahan

Pulau Enggano Provinsi Bengkulu diusulkan oleh masyarakat adat sebagai pulau konservasi. Usulan yang disampaikan pada pemerintah ini dilakukan sebagai salah satu langkah adaptasi perubahan iklim yang mengancam keberadaan pulau terluar seluas 40.000 M² itu serta agar kepulauan tersebut terlindung dari berbagai ancaman eksploitasi, mereka meminta pemerintah menjadikan Enggano sebagai pulau konservasi dan menjadikan enam desa di pulau ini sebagai desa konservasi. Enam desa tersebut adalah desa Kahyapu, Kaana, Apoho, Meok, Malakoni, dan Banjarsari. Pembangunan desa konservasi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, lanjutnya, mutlak dilakukan dengan menghentikan segala bentuk eksploitasi yang bisa merusak pulau terluar itu, dasar hukum berlaku berdasarkan surat keputusan dari Bupati Bengkulu Utara bahwa pulau Enggano telah menjadi kawasan konservasi perairan Enggano Nomor 175 Tahun 2014.

Masyarakat adat Pulau Enggano sepakat untuk menolak pembukaan perkebunan skala besar di daerah tersebut karena akan mengancam ketersediaan air bersih bagi warga di enam desa Pulau Enggano keberadaan hutan dan terumbu karang menjadi penopang utama keberlangsungan Pulau Enggano (National Geographic, 2011)

Pengelolaan kawasan perairan dengan cara konservasi merupakan bentuk kearifan dalam pengelolaan. Kearifan dalam mengelola alam sesungguhnya sudah menjadi ciri dari bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Hal itu ditandai dengan adanya berbagai kearifan lokal di berbagai daerah di tanah air yang merupakan peninggalan beberapa lapis generasi terdahulu yang masih lestari hingga saat ini.

Persepsi masyarakat berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap sumberdaya pesisir. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi Perairan (KKP) diperlukan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Persepsi dan partisipasi diperhatikan dalam kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di pulau Enggano, karena masyarakat pesisir khususnya nelayan merupakan pihak yang pertama merasakan dampak dari degradasi lingkungan di kawasan pesisir.

Peningkatan aktifitas kawasan dan kegiatan ekonomi yang kurang memperhatikan aspek kelestarian ekosistem dapat menimbulkan dampak yang sangat membahayakan bagi suatu kawasan. Sebagai kawasan pariwisata tidak terlepas dari permasalahan pengelolaan dan pengembangannya meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan seperti pemukiman, perikanan, pelabuhan, dan obyek wisata, menyebabkan tekanan ekologis terhadap

ekosistem pesisir juga semakin meningkat. Setiap tahunnya terjadi penurunan kualitas dan daya dukung ekosistem pesisir dan laut karena penangkapan ikan secara destruktif dan eksploitasi Terumbu Karang.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi Perairan (KKP) adalah metode survei, yakni membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta. Deskripsi penelitian akan memfokuskan pada persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP).

Analisis Persepsi dan Partisipasi Masyarakat

Analisis persepsi dan partisipasi nelayan menggunakan skala likert. Data yang diperoleh dari kuesioner adalah data ordinal yang mengukur tingkatan dari sangat positif sampai sangat negative, maka jawaban diberi skor 1 sampai 4, dengan Rincian :

- Sangat baik / sangat setuju / sangat tahu diberi skor 4
- Baik / setuju / tahu diberi skor 3
- Rusak / tidak setuju/ cukup diberi skor 2
- Sangat rusak /sangat tidak setuju diberi skor 1

Metode Penelitian

Metode penelitian persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi Perairan (KKP) adalah metode survei, yakni membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta. Deskripsi penelitian akan memfokuskan pada persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP).

Analisis Persepsi dan Partisipasi Masyarakat

Analisis persepsi dan partisipasi nelayan menggunakan skala likert. Data yang diperoleh dari kuesioner adalah data ordinal yang mengukur tingkatan dari sangat positif sampai sangat negative, maka jawaban diberi skor 1 sampai 4, dengan Rincian :

- Sangat baik / sangat setuju / sangat tahu diberi skor 4
- Baik / setuju / tahu diberi skor 3
- Rusak / tidak setuju/ cukup diberi skor 2
- Sangat rusak /sangat tidak setuju diberi skor 1

Ukuran persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKP dapat diketahui dengan menggunakan rumus yang digunakan Arafat (2010) sebagai berikut :

$$UP = \frac{\sum X_{ij} (ya) \times 100 \%}{NS}$$

Keterangan:

UP : Ukuran persepsi/ partisipasi masyarakat

X_{ij} : Jumlah nilai yang menjawab ya pertanyaan ke i dan responden ke-j

NS : Nilai sebenarnya/ seharusnya dari jawaban responden Selanjutnya nilai UP dibagi menurut kategori sebagai berikut:

- Nilai UP > 66,68 %: Persepsi Baik/Partisipasi Aktif

- Nilai UP 33,34% - 66,67 %: Persepsi Sedang/ Partisipasi Pasif

- Nilai UP < 33,33 %: Persepsi Tidak Baik/ Partisipasi Rendah (Negatif).

Analisis Persepsi masyarakat terhadap Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Pulau Enggano.

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran

berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama, dalam upaya pengelolaan Kawasan Konservasi

Perairan (KKP) perlu diketahui persepsi masyarakat karena masyarakat yang berperilaku positif terhadap upaya konservasi, pertanyaan untuk menggali tingkat persepsi masyarakat terdiri 15 pertanyaan, hasil jawaban yang dihimpun dari pertanyaan seputar persepsi.

Tabel 1. Alat dan bahan penelitian

No.	Alat dan Bahan	Satuan	Kegunaan
1	Kamera		Sebagai alat dokumentasi
2	Quisioner	(%)	Sebagai media informasi dalam wawancara masyarakat
3	Alat Tulis		Untuk mencatat

Tabel 2 Persepsi Masyarakat

No	Pertanyaan	Skor				Jumlah Skor	%
		4	3	2	1		
1	Persepsi Ekosistem Terumbu Karang sangat penting bagi anda?	20	0	0	0	80	100,0
2	Persepsi mengetahui keberadaan program KKP	10	8	2	0	68	85,0
3	Persepsi program KKP yang ada saat ini bermanfaat bagi anda?	4	16	0	0	64	80,0
4	Persepsi bagaimana akses pemanfaatan ekosistem terumbu karang sebelum dan sesudah adanya program KKP?	0	9	8	3	46	57,5
5	Persepsi bagaimana kondisi terumbu karang sebelum dan sesudah adanya program KKP?	11	6	3	0	68	85,0
6	Persepsi adanya program ini, pengetahuan anda tentang konservasi/terumbu karang meningkat?	12	7	2	0	71	88,8
7	Persepsi hasil produksi yang anda dapatkan sebelum dan sesudah adanya program KKP?	4	8	8	0	56	70,0
8	Persepsi pendapatan anda sebelum dan sesudah adanya program KKP?	1	16	3	0	58	72,5
9	Persepsi kondisi infrastruktur sebelum dan sesudah adanya program KKP	0	11	9	0	51	63,8
10	Persepsi adanya program ini, dapat meningkatkan produksi per unit tangkapan?	4	12	4	0	60	75,0
11	Persepsi adanya program ini, keluarga anda dapat membeli perabotan-perabotan rumah tangga?	2	7	11	0	51	63,8
12	Persepsi adanya program ini, keluarga anda dapat membangun dan memperbaiki kondisi rumah anda?	2	4	14	0	48	60,0

13	Persepsi adanya program ini, keluarga anda tidak lagi bergantung dengan renternir/punggawa?	16	4	0	0	76	95,0
14	Persepsi adanya program ini, pelaku <i>destruktif fishing</i> semakin berkurang?	16	4	0	0	76	95,0
15	Persepsi adanya program ini, dapat meningkatkan keterampilan dan usaha ekonomi anda?	15	5	0	0	75	93,8
Persepsi Masyarakat dan Nelayan kecamatan Enggano terhadap KKP (kawasan konservasi Perairan)		117	117	64	3	948	79,0

Masyarakat Enggano mempunyai tingkat persepsi (pemahaman) mengenai terumbu karang yaitu 100 % , hal ini dikarenakan seluruh responden telah memahami dan mengikuti sosialisasi terkait terumbu karang yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan surat keputusan No. 175 Tahun 2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Pulau Enggano melalui program Mitra Bahari yang menekankan pentingnya terumbu karang bagi pesisir. Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dimaksudkan untuk melindungi terumbu karang beserta komunitas invertebrata yang berasosiasi didalamnya serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pulau akan hidup yang lebih baik. Salah satunya KKP pulau Enggano yang telah berdiri sebagai salah satu upaya dalam menyelamatkan ekosistem terumbu karang dan diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat desa, khususnya para nelayan. Keberadaan KKP tersebut tidak secara langsung dapat menyelesaikan permasalahan pengelolaan ekosistem terumbu karang, sehingga diperlukan berbagai upaya pengelolaan KKP yang dapat memulihkan kondisi tersebut secara bertahap. Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana tujuan KKP ini dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal untuk mendapatkan perubahan dan manfaat adanya KKP baik dari segi ekologi maupun ekonomi, sehingga pada saat pengambilan data kuisioner di

kecamatan Enggano, daya dukung masyarakat sangat antusias dan mendukung ekosistem karang untuk dijaga dengan nilai persentase 100%.

Hasil Kuisioner pada Tabel 2 diatas juga menunjukkan bahwa masyarakat Pulau Enggano mempunyai persepsi 85,0% mengetahui keberadaan program Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di pulau Enggano, Selain itu keberadaan KKP juga memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat melalui pelatihan-pelatihan untuk peningkatan pengelolaan KKP yang merupakan indikator kelembagaan. Berdasarkan hal tersebut dan evaluasi indikator yang telah dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat telah mengetahui akan keberadaan KKP Enggano.

Masyarakat Enggano mempunyai tingkat persepsi mengenai apakah program KKP ini sangat bermanfaat sebesar 80,0 % pada Tabel 2. Program KKP yang diterapkan dipulau Enggano telah mensejahterakan masyarakat desa, karena telah membantu masyarakat akan sektor perikanan, perkebunan, dan pertanian. Oleh karena itu, dapat kita lihat seberapa besar peran KKP manfaat dan keberadaan KKP tersebut terhadap masyarakat Enggano

Keseluruhan wilayah daratan Pulau Enggano luasnya \pm 40.060 hektar. Luas terumbu karang di Kawasan Perairan Enggano \pm 5.097 ha, Ekosistem terumbu karang di Kawasan Pulau Enggano tersebar di perairan Tanjung Lakoaha, Tanjung Kioyeh, Tanjung Keramai, Tanjung

Labuha, Tanjung Kahabi, Teluk Harapan dan Kaana, sekeliling Pulau Dua, Pulau Merbau dan Pulau Satu (Ali, 2016) akses masyarakat akan pemanfaatan terumbu karang terbilang biasa dengan persentase 57,5 % pada Tabel 2, dikarenakan kedalaman air yg rata-rata 1 M orang dewasa sehingga tanpa menghalangi masyarakat setempat untuk melakukan konservasi terumbu karang. namun dengan akses yang mudah tersebut tidak membuat masyarakat untuk melakukan pemanfaatan terumbu karang yang merusak habitat terumbu karang tersebut, namun sebaliknya, dengan mudahnya akses terumbu karang membuat masyarakat setempat lebih mudah untuk menjaga keberadaan terumubu karang.

Tanjung Kokonahdi dan Tanjung Kaana merupakan satu garis pantai bagian timur Pulau Enggano dengan pasir putih dan reef flat kurang lebih 100 - 200 meter dari pantai yang berarus tenang dasar perairan berupa batu karang yang ditutupi terumbu karang. Jenis terumbu karang yang dijumpai adalah kelompok Acropora tabulat dengan lebar mencapai 2 meter, Acropora hystrik, Pocillopora, Seryatopora hystrik, Montipora sp. Biota lain yang ditemukan adalah jenis lili laut dan soft coral. Pada kedalaman 15-20 meter ditemukan pasir dengan rubble dengan sedikit jenis teripang. Di Teluk Enggano, kecerahan perairan kurang bagus pada kedalaman lebih dari 5 meter dengan dasar perairan berpasir dan bercampur lumpur. Pada kedalaman 4 meter ditemukan beberapa koloni karang hidup yang didominasi jenis coral massif, menurut KEPMENLH No 4. (2001), Suatu ekosistem terumbu karang akan semakin bagus kondisinya apabila persentase penutupan karang hidup pada ekosistem tersebut lebih besar daripada persentase tutupan abiotiknya. Kriteria baku kerusakan terumbu karang, apabila dibandingkan dengan terumbu karang sebelum adanya program KKP ini, terumbu di pulau Enggano sangat memprihatinkan, berdasarkan hasil

kuisioner KKP di pulau Enggano, kondisi terumbu karang membaik dengan persentase 85,0 % pada Tabel 2, dikarenakan tingkat pemahaman masyarakat yang meningkat akan pentingnya terumbu karang tersebut.

Pada Tabel 2 Pengetahuan masyarakat akan pentingnya terumbu karang yaitu 88,8 %, semakin meluas dan meningkatnya pengetahuan masyarakat, terbukti dari kesadaran pemuda dan masyarakat di pulau Enggano yang melakukan penanaman/konservasi terumbu karang di tepian pantai Enggano di setiap desanya, masyarakat tau apabila terumbu karang banyak rusak mereka susah mencari ikan, karena ikan hidup dan melakukan pemijahan serta mencari makan yaitu di terumbu karang.

Hasil produksi masyarakat pun meningkat drastis pada tabel 2 yaitu 70,0 %, Sebagai penghasil ikan terbanyak, jumlah unit penangkapan ikan di Desa Kahyapu mencapai 29 unit kapal yang aktif. Kapal yang digunakan adalah kapal dengan ukuran panjang 4-5 m dan lebar 1,5 m yang menggunakan mesin motor temple, Kawasan yang menjadi daerah penangkapan ikan bagi nelayan Desa Kahyapu, yaitu kawasan perairan Pulau Dua, Teluk Kiowa, Tanjung Kahoabi, Teluk Labuho, Tanjung Labuho, dan Pulau Satu. Ikan-ikan karang memang menjadi komoditi yang dominan sebagai hasil tangkapan nelayan di Desa Kahyapu. Kondisi perairan yang menjadi daerah penangkapan ikan merupakan kawasan pesisir dengan ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang menjadi habitat bagi ikan-ikan karang

Ikan yang paling banyak tertangkap adalah belanak (*Crenimugil crenilabis*) yaitu sebanyak 766,6 kg dan ikan yang paling sedikit tertangkap adalah baronang batik (*Siganus vermilucatus*) yaitu sebanyak 157 kg. Gillnet menangkap ikan pelagis dan ikan karang demersal, hal ini dikarenakan gillnet yang digunakan oleh nelayan di lokasi penelitian ada dua jenis,

yaitu gillnet dasar dan gillnet permukaan. Rawai menangkap ikan karang demersal, hal ini dikarenakan rawai yang digunakan adalah rawai permukaan yang daerah pengoperasiannya dilakukan di perairan dengan kedalaman sedang, pada jarak 1-3 mil dari garis pantai.

Pulau Enggano saat ini sudah memiliki beberapa sarana dan prasarana yang cukup bagus pada Tabel 2 sarana dan prasarana yang dimiliki telah mencapai 63,8 % dari hasil jawab responden, walaupun beberapa diantaranya masih dalam tahap pembangunan dan pengerjaan. Enggano memiliki 1 kantor camat yang berlokasi di desa Apoho, 2 buah puskesmas yang masih-masing terletak di Apoho dan Banjarsari, 2 buah dermaga yakni di Kahyapu dan Malakoni, 1 buah bandara di perbatasan antara Meok dan Banjarsari, 1 buah area peluncuran satelit dalam tahap awal, jalan raya beraspal sepanjang 35,5 km, jalan tanah sepanjang 18 km, 1 buah SMA di Malakoni, 2 buah SMP di Kahyapu dan Apoho, 5 buah SD inpress dan 1 buah perpustakaan di Meok.

Hasil tangkapan ikan oleh nelayan Enggano meningkat drastis dengan persentase pada Tabel 2. 75 % meningkatkan hasil produksi, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bengkulu berdasarkan harga berlaku Tahun 2017 sebesar Rp 60.675,68 miliar. Dari jumlah tersebut, kontribusi yang paling besar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 29,22%. Dalam 5 tahun terakhir (Tahun 2013-2017), rerata kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,92%. Dua subsektor dengan kontribusi paling besar Tahun 2017 adalah subsektor tanaman pangan berkontribusi sebesar 9,25% dan subsektor perikanan berkontribusi sebesar 6,75% (BPS Provinsi Bengkulu 2017). Data ini mengindikasikan bahwa mata pencaharian utama masyarakat adalah petani dan nelayan. Jumlah petani pada Tahun 2016 mencapai 375.970 KK dan jumlah nelayan mencapai 16.437 KK,

dari 480.357 KK yang ada di Provinsi Bengkulu (BPS Provinsi Bengkulu 2017). Peluang pengembangan subsektor perikanan sebagai penopang utama ekonomi rumah tangga masyarakat Provinsi Bengkulu pada masa yang akan datang semakin besar. Hal ini bisa terjadi karena adanya fenomena alih fungsi lahan, seperti areal sawah pada Tahun 2012 seluas 99.702 hektar menjadi 91.651 hektar pada Tahun 2015. Pengembangan subsektor perikanan juga didukung oleh posisi Provinsi Bengkulu yang sebagian besar wilayahnya terletak disepanjang pantai barat Sumatera dengan garis pantai sepanjang 525 km, sehingga 7 dari 10 kabupaten/kota berhadapan langsung dengan Samudera Hindia (BPS Provinsi Bengkulu 2017).

Dengan adanya program KKP ini, membuat masyarakat Enggano semakin terbantu dari segi meningkatnya hasil tangkapan ikan mereka, masyarakat Enggano juga telah meningkatkan taraf hidup mereka dengan membeli perabotan rumah tangga dan melakukan perbaikan bangunan rumah mereka, apapun hal yang mereka butuhkan telah terpenuhi penulis telah mengajukan terkait peningkatan taraf hidup, nilai persepsi masyarakat Enggano yaitu 63,8 % dan 60,0 pada Tabel 2. Masyarakat Enggano telah bisa hidup mandiri tanpa bergantung kepada rentenir / punggawa Masyarakat Enggano juga telah dibekali cara penggunaan uang dengan bijak, sehingga mereka lebih bisa mengatur uang mereka sendiri, dalam hal ini program KKP ini sangat membantu masyarakat Enggano dari kebergantungan terhadap rentenir, dari hasil quisioner penulis persentase masyarakat Enggano sesuai dengan pertanyaan yang di ajukan 95,0 % pada Tabel 2.

Persepsi Masyarakat Enggano terkait pelaku deskruktif fishing 95,0 % pada Tabel 2, Mengacu pada IUCN (1994), istilah *Marine Protected Area* (MPA) adalah daerah paparan intertidal atau subtidal beserta perairannya yang

berasosiasi dengan flora, fauna, sejarah dan budaya yang dilindungi oleh hukum atau semacamnya sebagai upaya melindungi sebagian atau seluruh lingkungan kawasan tersebut. Menurut Kenchington *et al.* (2003), *Marine Protected Area* (MPA) merupakan area wilayah laut yang terutama diperuntukkan bagi perlindungan keanekaragaman hayati, sumberdaya alam dan kultural dan dikelola dengan baik demi keberlanjutan sumberdaya, dengan aturan yang ada tersebut membuat para pelaku deskruktif fishing semakin berkurang, pada saat ini masyarakat Enggano telah memerangi deskruktif fishing karena dapat merugikan masyarakat Enggano.

Sanksi pelanggaran yang diberikan bagi pelanggar antara lain:

1) Apabila pengguna baik masyarakat lokal maupun pendatang melakukan pelanggaran baik dengan sengaja maupun tidak pada wilayah pemanfaatan pulau Enggano, dikenakan sanksi tingkat pertama berupa peneguran sebanyak 3 (tiga) kali secara lisan dan tertulis dengan denda biaya administrasi yang besarnya diatur dalam peraturan desa

2) Apabila pengguna baik masyarakat lokal maupun pendatang melakukan kegiatan yang merusak dan berulang akan dikenakan sanksi II (tingkat ke-dua) ditambah dengan biaya administrasi yang besarnya diatur dalam peraturan desa

3) Apabila pengguna baik masyarakat lokal maupun pengguna dari luar melakukan pelanggaran tiga kali berturut-turut akan dikenakan sanksi III (tingkat ke-tiga), didenda berupa biaya administrasi yang besarnya diatur dalam peraturan desa, dan ditambah dengan semua hasil tangkapan dilepas ke habitatnya atau dimanfaatkan kembali oleh masyarakat desa

Selanjutnya, diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan pengguna tersebut tidak diperkenankan kembali melakukan aktifitas perikanan dalam wilayah pulau Enggano dan sekitarnya

Adanya program KKP meningkatkan ketrampilan masyarakat Enggano dalam bidang penjualan hasil olahan pisang, persepsi masyarakat terkait ketrampilan masyarakat pada 93,8 % pada Tabel 2, Masyarakat antusias dengan pelatihan yang telah di programkan oleh pemerintah terkait pelatihan dan keterampilan, sehingga jenis usaha terbuka dan wawasan masyarakat menjadi luas dapat membuka lapangan pekerjaan yang ramah lingkungan dan dapat menjaga kelestarian terumbu karang, adapun hasil keterampilan masyarakat Enggano dari olahan pisang asli Enggano, Enggano Banana Chips, di tahun 2017 pernah mendapat order ekspor ke Cina, usaha ini membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Enggano. Nama Enggano Banana Chips diambil dari nama salah satu Pulau terluar Indonesia, yaitu Pulau Enggano. Pulau Enggano adalah Pulau yang luasnya +- 397,2 KM2 yang berada di Provinsi Bengkulu, dengan komoditas utamanya adalah penghasil pisang kepok. Masyarakat Pulau Enggano berharap pisang kepok dapat terjual dengan maksimal, tetapi kenyataannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya adalah faktor cuaca dan transportasi laut, sehingga penjualan bahan baku pisang kurang maksimal. Dari CV. Faiz Barokah pertama kali memulai, membuat mitra kepada masyarakat Enggano dari masing-masing desa, mengajari cara membuat keripik yang standar, dan memberikan berupa modal. Keripik pisang Enggano pernah mengikut Bengkulu Expo atau pameran ke luar provinsi mewakili Provinsi Bengkulu. Harapan kedepannya kita mendapat kesempatan ekspor, baik itu dari pembeli sendiri atau dibantu dari Pemerintah Daerah. Karena pisang di Enggano sangat banyak, kalo dijual berbentuk pisang harganya sangat rendah, tapi kalo sudah diolah jadi keripik bisa dua kali lipat harganya, jadi dapat juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat

Enggano, Untuk hasil produksi didistribusikan melalui agen di kota Bengkulu, juga dititipkan di toko oleh-oleh di Anggut, dan beberapa diluar provinsi Bengkulu, tergantung permintaan kerjasama, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, kini menjadi salah satu daerah penghasil pisang kepok terbesar di Bengkulu. Setiap hari, ribuan tandan pisang kepok dari pulau terluar ini dipasok ke Kota Bengkulu

Analisis Partisipasi masyarakat terhadap Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi dalam kebijakan kegiatan, mem-

ikul beban dalam pelaksanaan kegiatan, dan memetik hasil dan manfaat kegiatan secara merata.

Alfiandra (2009) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan evaluasi. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan, sedangkan partisipasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pemikiran, pendanaan, dan material yang diperlukan-

Tabel 3. Partisipasi Masyarakat

No	Pertanyaan	Skor				Jumlah Skor	%
		4	3	2	1		
1	Apakah saudara berpartisipasi dalam kegiatan program KKP di desa ini?	17	3	0	0	77	96,3
2	Apakah saudara berpartisipasi dalam pengembangan program dan kegiatan pengelolaan terumbu karang?	19	1	0	0	79	98,8
3	Apakah kegiatan program ini mengganggu waktu kerja anda?	5	4	11	0	54	67,5
4	Apakah saudara berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan kelembagaan?	8	10	2	0	66	82,5
5	Apakah saudara diberi kesempatan dalam mengeluarkan pendapat atau pertanyaan pada pelatihan-pelatihan program KKP ini?	4	11	5	0	59	73,8
6	Apakah saudara dengan ikut berpartisipasi dapat memberikan peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan sumberdaya terumbu karang?	10	9	1	0	69	86,3
7	Apakah saudara dengan ikut berpartisipasi dapat memberikan peningkatan pendapatan	14	6	0	0	74	92,5
8	Apakah saudara dengan ikut berpartisipasi dapat memberikan kesempatan dalam mengembangkan usaha mata pencaharian alternatif?	8	8	4	0	64	80,0
9	Apakah saudara berpartisipasi dalam	9	10	1	0	68	85,0

	aktivitas keagamaan?						
10	Apakah saudara berpartisipasi untuk tidak terlibat dalam <i>destruktif fishing</i> ?	20	0	0	0	80	100,0
11	Apakah saudara berpartisipasi dalam mengawasi dan memonitoring sumberdaya terumbu karang desa?	19	1	0	0	79	98,8
12	Apakah saudara berpartisipasi dalam menyukseskan program KKP di desa ini?	16	4	0	0	76	95,0
13	Apakah saudara berpartisipasi dalam mengikuti semua pelatihan-pelatihan yang diadakan program pemerintah?	12	5	3	0	68	85,0
14	Apakah saudara berpartisipasi ikut memasarkan hasil tangkapan nelayan?	17	3	0	0	77	96,3
15	Apakah saudara berpartisipasi dalam rangka pengembangan pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa?	20	0	0	0	80	100,0
Partisipasi Masyarakat dan Nelayan kecamatan enggano terhadap KKP (kawasan konservasi Perairan)		198	75	27	0	1070	89,2

Masyarakat pulau Enggano sangat berpartisipasi terkait program KKP ini, dengan persentase 96,3 % pada Tabel 3, partisipasi yang ditunjukkan masyarakat Enggano yaitu terjun langsung dalam pengawasan dan penjagaan terumbu karang serta daerah yang termasuk di dalam area konservasi, Pada umumnya masyarakat antusias dalam menjaga keberadaan KKP, hal ini dilihat beberapa masyarakat ikut dalam survei dan monitoring kondisi terumbu karang, baik di KKP dan diluar KKP. Selain itu ikut membantu petugas dalam melarang segala kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti yang pernah terjadi di sekitar perairan desanya, mereka melarang dan menegur beberapa nelayan luar yang mencoba menangkap ikan di dalam KKP dan melakukan pemboman diluar KKP. Mungkin atas kesadaran ini yang membuat mereka melarang praktek penangkapan ikan secara destruktif karena mereka tahu bahwa jumlah ikan menurun akhir-akhir ini. Mereka juga umumnya sadar bahwa hasil tangkapan mereka

menurun dan pendapatan mereka dari hasil penangkapan ikan juga menurun. Disamping itu responden juga ditanya tentang sikap mereka dan ketaatan kepada peraturan-peraturan terkait ditetapkannya sebagian perairan mereka sebagai daerah terlarang dalam segala aktivitas penangkapan ikan.

Partisipasi masyarakat sangat terlihat pada kegiatan masyarakat yang sangat menjaga keberadaan terumbu karang dengan nilai persentase 98,8 % pada Tabel 3, Beberapa hal yang diketahui oleh masyarakat adalah tujuan menjalankan program penyelamatan dan perlindungan terumbu karang, yang bertujuan untuk melindungi terumbu karang agar ikan tetap terjaga ekosistemnya, merehabilitasikan terumbu karang, Untuk menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang, masyarakat pada umumnya juga tahu mengapa pemerintah melarang masyarakat melakukan pemboman ikan atau menggunakan racun sianida terdapat beberapa Resiko yang diketahui oleh

mereka, Risiko terhadap manusia itu sendiri, Hancurnya terumbu karang serta jenis-jenis ikan yang kecil pada Penggunaan sianida, merusak serta membunuh plankton-plankton yang ada serta terumbu karang, apabila dibom terumbu karang akan hancur, sehingga ikan-ikan akan pindah jauh cari tempat lain, serta Populasi ikan akan berkurang karena ikan-ikan yang masih kecil juga mati, sehingga ikan akan semakin berkurang di masa yang akan datang ikan-ikan akan berkurang bahkan habis.

Masyarakat nelayan Pulau Enggano sebesar 67,5 % pada Tabel 3 menilai bahwa program KKP ini tidak mengganggu waktu kerja masyarakat, masyarakat bisa melakukan penangkapan ikan kapan saja asalkan cuaca mendukung, telah ada pembagian waktunya antar kelompok untuk melakukan pengawasan terhadap KKP Pulau Enggano, masyarakat melakukan kegiatan pengawasan KKP dengan sukarela, keberadaan program KKP tidaklah menjadi beban bagi masyarakat karena kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberadaan KKP dan manfaatnya bagi masyarakat.

Sosial kemasyarakatan di pulau Enggano sangat kuat, nilai partisipasi masyarakat juga sangat baik 82,5 % pada Tabel 3, Kehidupan beragama di pulau Enggano misalnya, meskipun kondisi masyarakatnya tergolong masyarakat terasing, terisolir atau terpencil di antara daerah di Indonesia. Pulau Enggano adalah salah satu daerah yang terletak paling selatan di antara pulau-pulau yang berada di sebelah Barat pulau Sumatera, yang berjarak 90 mil dari ibukota provinsi Bengkulu. Pulau Enggano secara administratif memiliki enam desa, yaitu desa Apoho, Meok, Banjarsari, Malakoni, Kaana dan Kahyanu. Kehidupan masyarakat pulau Enggano berpedoman kepada sistem nilai-nilai budaya warisan nenek moyangnya, seperti kelompok-kelompok suku bangsa, sistem perkawinan adat, sistem kepemimpinan tradisional,

pola pemukiman tradisional dan sistem kemasyarakatan. Dewasa ini sistem-sistem tersebut masih terpelihara, dipertahankan dan dijadikan landasan sosial bagi kehidupan antarumat beragama. Kehidupan keagamaan masyarakat suku-suku bangsa Enggano, terdiri dari: agama Islam dan agama Kristen-Protestan, yang memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Kedua agama yang besar ini hidup berdampingan secara damai dengan jiwa gotong-royong dan baik. Sebagai contoh, pada tahun 1938 masjid pertama kali dibangun di desa Malakoni dengan nama masjid Jami'. Pembangunan masjid Jami' ini dikerjakan bersama-sama secara gotong-royong oleh penduduk Enggano, baik umat Islam maupun Kristen-Protestan. Yang menjadi landasan sosial antarumat beragama adalah norma-norma hukum adat. Interaksi sosial antarumat beragama dilandaskan pada hukum adat, meskipun ada hukum negara dan hukum agama. Hukum adat diberlakukan untuk semua orang yang menetap di pulau Enggano. Hukum adat telah ditetapkan oleh nenek moyang dahulu dan selalu digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan setiap sengketa antarwarga suku bangsa. Paabuki bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukum adat yang dibantu oleh ekap'u dan orai. Dengan demikian, hukum adat adalah hukum asli Enggano yang tidak tertulis dan mengatur semua lapangan kehidupan antarwarga suku-suku bangsa Enggano

Tingkat partisipasi masyarakat Enggano dalam mengeluarkan pendapat pada pelatihan untuk mendukung kegiatan KKP sebesar 73,8 % pada Tabel 3, pada tahun 2017 peningkatan keterampilan masyarakat dilakukan pelatihan olahan pisang gepok merupakan pisang asli dari Enggano, pengemasan banyak dilakukan oleh ibu-ibu nelayan.

Masyarakat Enggano memahami pentingnya pengetahuan terkait terumbu karang, sehingga masyarakat Enggano saling berbagi informasi dalam penjaan

kelestarian terumbu karang, dengan nilai persentase 86,3 % pada Tabel 3 tingkat pemahaman masyarakat Enggano terkait terumbu karang sudah cukup untuk melindungi dan menjaga terumbu karang di pulau Enggano dari kerusakan.

Partisipasi masyarakat Enggano membuat pendapatan mereka menjadi meningkat dengan persentase 92,5 % pada Tabel 3, hal ini dikarenakan terumbu karang yang bagus membuat ikan tempat mereka memijah menjadi terjaga, sehingga pendapatan hasil tangkapan ikan meningkat.

Ikan-ikan karang memang menjadi komoditi yang dominan sebagai hasil tangkapan nelayan di Desa Kahyapu. Kondisi perairan yang menjadi daerah penangkapan ikan merupakan kawasan pesisir dengan ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang menjadi habitat bagi ikan-ikan karang. Ikan yang paling banyak tertangkap adalah belanak (*Crenimugil crenilabis*) yaitu sebanyak 766,6 kg dan ikan yang paling sedikit tertangkap adalah baronang batik (*Siganus vermilucatus*) yaitu sebanyak 157 kg. Gillnet menangkap ikan pelagis dan ikan karang demersal, hal ini dikarenakan gillnet yang digunakan oleh nelayan di lokasi penelitian ada dua jenis, yaitu gillnet dasar dan gillnet permukaan. Rawai menangkap ikan karang demersal, hal ini dikarenakan rawai yang digunakan adalah rawai permukaan yang daerah pengoperasiannya dilakukan di perairan dengan kedalaman sedang, pada jarak 1-3 mil dari garis pantai.

Partisipasi Masyarakat Enggano dalam pengelolaan KKP mempunyai tingkat partisipasi dalam mengembangkan usaha mata pencaharian alternatif sebesar 80,0 % pada Tabel 3, pengembangan usaha mata pencaharian alternatif menjadi sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka, menambah pendapatan atau setidaknya dapat menambah pengetahuan mereka mengenai cara pembuatan pisang manis

yang menjadi komoditi andalan pulau Enggano.

Partisipasi Masyarakat Enggano dalam aktivitas keagamaan sangat kuat 85,0 % pada Tabel 2, masyarakat Enggano tergolong masyarakat petani dan nelayan yang masih tradisional. Masyarakat hidup membaur dalam pluralitas etnis suku bangsa, sosial dan agama. Secara historis kehidupan masyarakat ini belum pernah mengalami konflik antarumat beragama, kecuali masalah kriminal biasa. Karena, para penganut agama yang berbeda tidak pernah mempersoalkan masalah perbedaan baik masalah sosial, ekonomi maupun agama. Oleh karena itu, fenomena suasana kebersamaan dalam umat beragama tersebut tampak dalam beberapa aktivitas, antara lain: a) Kerjasama sosial yang melibatkan antarumat beragama, seperti dalam upacara perkawinan, upacara kematian, pembukaan lahan/sawah, pembangunan sarana dan prasana umum. b) Saling kunjung para tokoh agama baik ke gereja ataupun ke masjid, seperti dalam acara pertemuan antartokoh dan acara biasa. Berdasarkan fenomena itu, sebenarnya terwujudnya interaksi sosial antarumat beragama tersebut didorong oleh beberapa faktor, yaitu: 1) Faktor tradisi, yang ada sejak nenek moyang mereka dengan sifat gotong-royong dan tolong-menolong. 2) Faktor kekerabatan antarsuku bangsa, yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa. 3) Faktor misi dakwah, yang menekankan aspek kemanusiaan dan pemberdayaan umat. 4) Faktor kerjasama antartokoh agama, pemimpin adat dan aparat pemerintah. 5) Ada persepsi antarumat agama, bahwa perbedaan agama merupakan masalah yang lazim dan harus diterima. 6) Tidak adanya provokasi yang menimbulkan perpecahan, baik oleh masyarakat, tokoh dan pemimpin maupun pihak ketiga.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Enggano untuk tidak terlibat dalam kegiatan *destrutif fishing* sebesar 100% sangat berpartisipasi (aktif), mereka selain

tidak melakukan *destruktif fishing* juga mengajak nelayan lain baik yang berasal dari pulau Enggano maupun luar desa tidak melakukan *destruktif fishing*.

Responden umumnya mengetahui resiko dari kegiatan *destruktif fishing*, yaitu: risiko terhadap manusia itu sendiri dan populasi ikan akan berkurang serta terumbu karang akan hancur. Masyarakat menyadari arti penting kawasan KKP sebagai kawasan ekosistem yang perlu dijaga karena memberikan manfaat dalam kelestarian sumberdaya ikan. Bentuk partisipasi lainnya dapat juga dilihat dari jenis alat tangkap yang digunakan oleh responden yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Lokasi KKP yang berdekatan dengan pemukiman lebih memungkinkan pengawasan yang baik, sehingga aktifitas *destructive fishing* bisa ditekan.

Sanksi pelanggaran yang diberikan bagi pelanggar antara lain:

1) Apabila pengguna baik masyarakat lokal maupun pendatang melakukan pelanggaran baik dengan sengaja maupun tidak pada wilayah pemanfaatan pulau Enggano, dikenakan sanksi tingkat pertama berupa peneguran sebanyak 3 (tiga) kali secara lisan dan tertulis dengan denda biaya administrasi yang besarnya diatur dalam peraturan desa

2) Apabila pengguna baik masyarakat lokal maupun pendatang melakukan kegiatan yang merusak dan berulang akan dikenakan sanksi II (tingkat ke-dua) ditambah dengan biaya administrasi yang besarnya diatur dalam peraturan desa

3) Apabila pengguna baik masyarakat lokal maupun pengguna dari luar melakukan pelanggaran tiga kali berturut-turut akan dikenakan sanksi III (tingkat ketiga), didenda berupa biaya administrasi yang besarnya diatur dalam peraturan desa, dan ditambah dengan semua hasil tangkapan dilepas ke habitatnya atau dimanfaatkan kembali oleh masyarakat desa

Selanjutnya, diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan pengguna tersebut tidak diperkenankan kembali melakukan aktifitas perikanan dalam wilayah pulau Enggano dan sekitarnya

Partisipasi masyarakat sangat antusias dalam menjaga keberadaan KKP 98,8 % pada Tabel 3, hal ini dilihat beberapa masyarakat ikut dalam survei dan monitoring kondisi terumbu karang, baik di KKP dan diluar KKP. Selain itu ikut membantu petugas dalam melarang segala kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan hal ini dikarenakan masyarakat tau akan pentingnya pengawasan terumbu karang, karena apabila terumbu karang rusak akan dapat merugikan mereka.

Partisipasi masyarakat Enggano akan sukses nya program KKP sangat berpartisipasi 95,0 % pada Tabel 3, masyarakat Enggano sangat antusias dan sangat setuju untuk program ini dilanjutkan, karena akan pentingnya proram ini bahwa keberlanjutan pulau Enggano masih akan di huni oleh anak cucu mereka, sehingga masyarakat desa juga mendukung penuh apapun program pemerintah terkait konservasi pulau Enggano.

Partisipasi Masyarakat Enggano dalam mengikuti mengikuti semua pelatihan-pelatihan yang diadakan program pemerintah 85,0 % pada Tabel 3, penambahan pengetahuan masyarakat akan pentingnya setiap program membuat antusias masyarakat untuk selalu menambah ilmu dan pengetahuan terkait program KKP Pulau Enggano, sehingga masyarakat tidak mau tertinggal informasi dan mengikuti semua pelatihan yang diadakan oleh pemerintah.

Partisipasi masyarakat Enggano dalam memasarkan hasil tangkapan ikan nelayan 96,3 % pada Tabel 3, hal ini disebabkan mata pencaharian mereka adalah Hasil tangkapan ikan, sehingga

masyarakat Enggano bersama sama mereka pasarkan ke luar daerah.

Dalam wawancara terakhir penulis kepada responden terkait sarana dan prasarana yang ada di pulau Enggano, mereka berharap pemerintah daerah dapat mempercepat perbaikan sarana dan prasaran, masyarakat siap untuk melakukan partisipasi pengembangan pembangunan daerah tertera pada wawancara penulis dengan persentase 100 % pada Tabel 3, karena sarana dan prasarana sangat penting untuk kemajuan Pulau Enggano saat ini sudah memiliki beberapa sarana dan prasarana yang cukup bagus walaupun beberapa diantaranya masih dalam tahap pembangunan dan pengerjaan. Enggano memiliki 1 kantor camat yang berlokasi di desa Apoho, 2 buah puskesmas yang masih-masing terletak di Apoho dan Banjarsari, 2 buah dermaga yakni di Kahyapu dan Malakoni, 1 buah bandara di perbatasan antara Meok dan Banjarsari.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang persepsi dan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) pulau Enggano provinsi Bengkulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Masyarakat pulau Enggano mempunyai tingkat persepsi baik (79,00 %) positif.
- Tingkat partisipasi aktif (89,2 %) dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan pulau Enggano provinsi Bengkulu, hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat serta kuisisioner yang telah ditanyakan, serta daya dukung masyarakat terkait program KKP ini sangatlah antusias untuk menjadikan pulau Enggano menjadi Kawasan Konservasi Perairan, dapat dilihat dari masyarakat

setempat menjaga kelestarian terumbu karang dan ekosistem Mangrove.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi H. 2011. Progres Pengembangan Sistem Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Development And Progress Of Marine Protected Area Systems In Indonesia. Coral Triangle Support Partnership (CTSP). Jakarta
- Adrianto L. 2006. Pengantar Penilaian Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut. Dept. Manajemen Sumberdaya Perairan. Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-IPB. Bogor.
- Adrianto L. 2007. Pendekatan dan Metodologi Evaluasi Program Marginal Fisheries Community Development 2004 - 2006. [Working Paper]. Kerjasama Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bogor
- Arafat, M.Y. 2010. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat DesaTabo terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTHT) Balai Diklat Kehutanan Makassar. Tesis. Program Pasca Sarjana Studi Sistem Pertanian Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Alfiandra, 2009. Kajian partisipasi masyarakat yang melakukan pengelolaan persampahan 3R di Kelurahan Ngaliyan dan Kalipancur Kota Semarang, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang. [terhubung berkala]. <http://eprints.undip.ac.id/>

- 24266 / 1 / ALFIANDRA .pdf. [9 November 2013].
- Bato M, Yulianda F, Fahrudin A. 2013. Kajian manfaat kawasan konservasi perairan bagi pengembangan ekowisata bahari di kawasan konservasi perairan Nusa Penida Bali. *Depik*, 2 (2): 104 -113.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. 2017. Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2017. Bengkulu
- Budi S. 2007. Analisis Keberlanjutan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Pendektan Model Ekologi Ekonomi (Analysis of Small Islands Development Sustainability: An Ecology-Economical Model Approach). *Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia*, 14 (1): 29 – 35
- Carter E, A Soemodinoto, A White. 2011. Panduan untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Indonesia. Bali-Indonesia: Program Kelautan The Nature Conservancy Indonesia. Bali.
- COREMAP II Coral Reef Rehabilitation and Management Program Phase II. 2007. Pedoman Umum Pengelolaan Berbasis Masyarakat. Dir. Jend. Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Dahuri R, J Rais, SP Ginting, MJ. Setepu. 1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta.
- English, S., Wilkinson, C., Baker, V. 1994. Survey Manual for Tropical Marine Resources. Australian Institute of Marine Science. Townsville. 368 pp.
- Elysia V 2014. Kajian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. *Forum Ilmiah*, 11(3): 334 – 343
- Estradivari, Handayani C, Firmansyah F, Yusuf M, Santiadji V 2017. Kawasan Konservasi Perairan: Investasi Cerdas untuk Perlindungan Keanekaragaman Hayati Laut dan Membangun Perikanan Indonesia. WWF, Jakarta.
- Gay, L.R. and Diehl, P.L. 1992. *Research Methods for Business and Management*. Macmillan Publishing Company. New York.
- Grimble R, Chan M. 1995. Stakeholder Analysis for Natural Resource Management in Developing Countries. *Nat Resour For*, 19 (2): 113-124.
- Hastuty R, Andrianto L, Yonvitner 2015. Kajian Manfaat Kawasan konservasi Bagi Perikanan Yang Berkelanjutan di Pesisir Timur pulau Weh. *Jurnal teknologi perikanan dan kelautan*, 6 (1): 105 - 116.
- Hulu T. 2009. Efektifitas Pengelolaan Terumbu Karang Di Kawasan Daerah Perlindungan Laut Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara. [Thesis] Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Humas3 2012. Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat https://prasetya.ub.ac.id/berita/Pengelolaan_Lingkungan_Berbasis_Masyarakat_11826_id.pdf. Diakses 21 November 2012.
- https://www.researchgate.net/publication/282283984_Pelibatan_Masyarakat_dalam_Penanggulangan_Kerusakan_Lingkungan_Pesisir_dan_Laut. Diakses 29 september 2015
- Indrajaya, A.A. Taurusmasn, B. Wiryawan, I. Yulianto. 2011. Integrasi Horisontal Jejaring Kawasan Konservasi Perairan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap. Coral Triangle Support Partnership. Jakarta.

- [IUCN] International Union for Conservation of Nature. 1994. Guidelines for Protected Area Management Categories. IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, U.K.
- Jepamandar 2011. kawasan konservasi laut.
<http://jepamandar.blogspot.co.id/2011/06/kawasan-konservasi-laut.html>. Diakses 6 Juni 2011.
- Koentjaraningrat, 1991. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta, Gramedia
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. 2001. Nomor : 04 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang.
- Kenchington R, Ward T, Hegerl E. 2003. The Benefit of Marine Protected Areas. Department of Environment and Heritage: Commonwealth of Australia. Australia.
- Muqsit A 2016. Struktur Komunitas Terumbu Karang Di Pulau Dua Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Jurnal Enggano Vol. 1, No. 1, April 2016: 75-87
- Manurung R., 2008. Persepsi dan partisipasi siswa sekolah dasar dalam pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Jurnal Pendidikan Penabur. 1(10):22-34. [terhubung berkala]. <http://www.bpkpenabur.or.id/files/Hal.%2022-34%20Persepsi%20dan%20partisipasi%20siswa.pdf>. [20 Oktober 2013]
- Natioal Geographic 2011. Pulau Enggano Diusulkan Menjadi Kawasan Konservasi.<http://nationalgeographic.co.id/berita/2011/11/pulau-enggano-diusulkan-menjadi-kawasan-konservasi>. Diakses 29 November 2011. 13: 47
- Nazir M. 2003. Metode Penelitian Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nella T 2016. Struktur Komunitas Mangrove Di Desa Kahyapu Pulau Enggano. Jurnal Enggano Vol. 1, No. 1, April 2016: 19-31
- Nugraha A 2016. Kondisi Terumbu Karang Di Tanjung Gosongseng Desa Kahyapu Pulau Enggano Provinsi Bengkulu. Jurnal Enggano vol. 1, No. 1, April 2016: 43-56
- Oktamalia 2016. Studi Jenis Dan Kelimpahan Teripang (*Holothuroidea*) Di Ekosistem Padang Lamun Perairan Desa Kahyapu Pulau Enggano Jurnal Enggano Vol. 1, No. 1, April 2016: 9-17
- Pomeroy R S, Parks J E, Watson L N. 2004. How Is Your MPA Doing? A Guide book of Natural and Social Indicators for Evaluating Marine Protected Area Management Effectiveness. IUCN The World Conservation Union.
- Pollnac R, L Bunce, P Townsley, Robert P. 2000. Socioeconomic Manual For Coral Reef Management. Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN).
- Salim A 2015. Tujuh Kategori Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. <http://bp3ambon.kkp.org/2015/05/11/tujuh-kategori-pengelolaan-kawasan-konservasi-perairan>. Diakses 11 May 2015.
- Salim D 2011. Kajian Efektivitas Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Desa Mattiro Labangen Kabupaten Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Sugihartono, Fathiyah KN, Harahap F, Setiawati FA, Nurhayati SR. 2007. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta, UNY Press.
- Wahyudin Y 2005. Pelibatan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut.